

nawala

edisi 8
volume 7

Buku Bulan ini

Memulihkan Luka Korban Kasus Korupsi
Resensi dari Buku "Studi Pemulihan Korban
Tindak Pidana Korupsi"

INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi

- Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective
- Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes

Koleksi Bulan ini!

- Di Bawah Cengkeraman KPK: Pergulatan para Korban Penyalahgunaan Kewenangan KPK
- Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia
- Masalah Korban Kejahatan
- Memahami *Whistleblower*
- Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci dan Dibutuhkan
- *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide* untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based/ NCB Asset Forfeiture*)

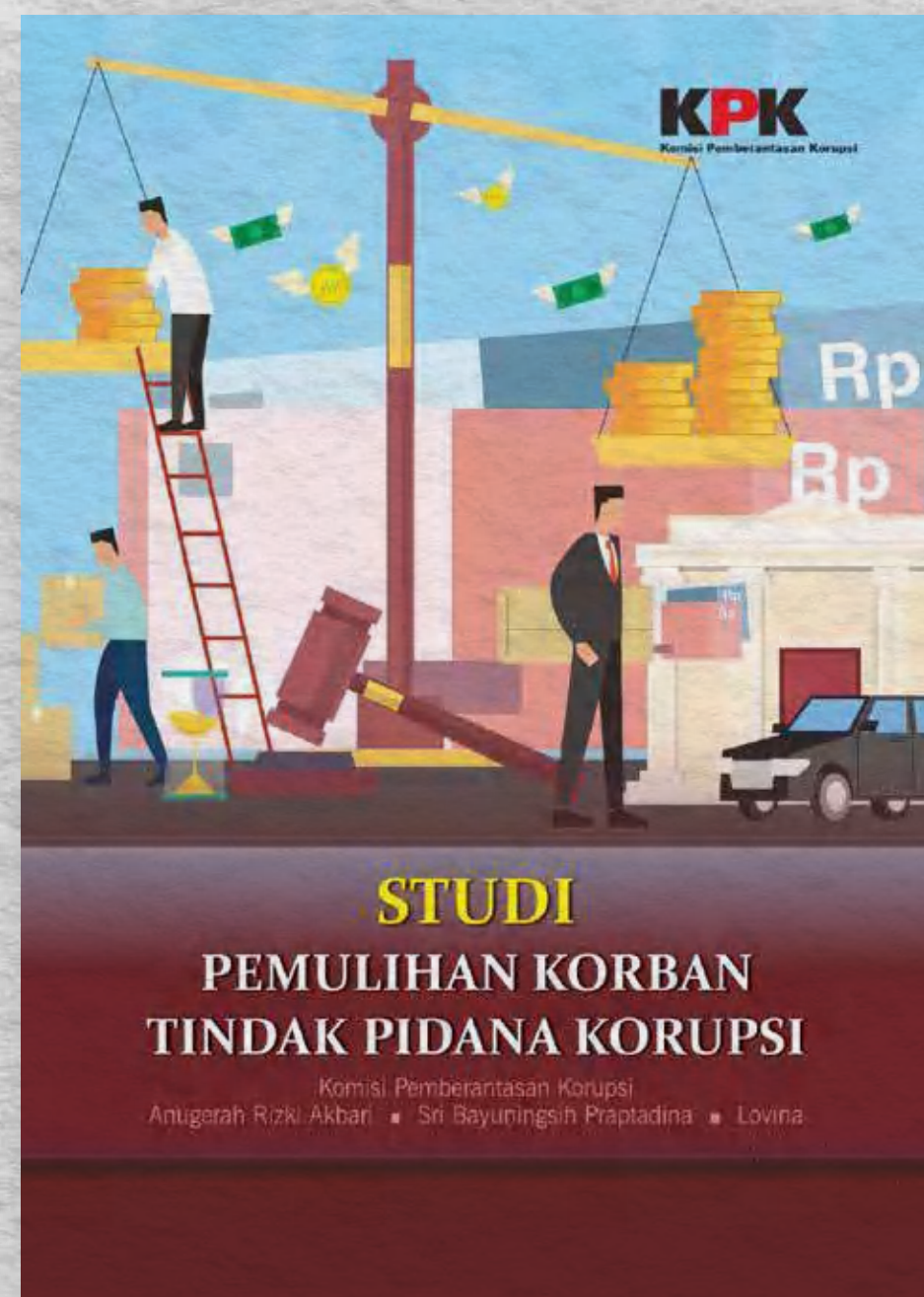


Gedung Merah Putih KPK Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

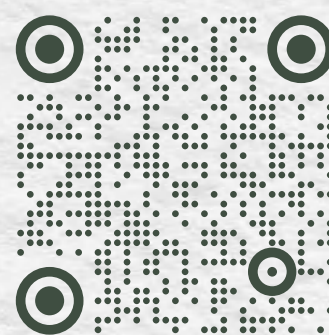
MEMULIHKAN LUKA KORBAN KASUS KORUPSI

Dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan perekonomian saja namun dapat menimbulkan korban yang disebabkan dari lingkungan atau sumber daya yang dikorupsi. Memahami konsep-konsep korban kasus korupsi maka diperlukan adanya studi yang mendalam hal ini. Buku **Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi** membahas dengan lengkap mengenai pemulihan korban akibat tindak pidana korupsi. Penyusun buku ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan para ahli hukum pidana, perdata, kriminolog, praktisi, hakim dan pakar-pakar lain yang berkompeten. Buku ini disusun melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pakar dalam maupun luar negeri.

Dimulai dengan latar belakang permasalahan yaitu kewajiban negara dalam memberikan jaminan pemulihan akibat tindak pidana korupsi hingga lebih dalam membahas praktik terbaik dalam pemulihan korban tindak pidana korupsi. Para penyusun buku ini mewawancarai serta berdiskusi mengenai dasar hukum hingga aspek sosiologis pemulihan korban tindak pidana korupsi yang mencakup tentang ruang lingkup, evaluasi, serta praktik pemulihan korban tindak pidana korupsi. Semua temuan dalam buku ini berdasarkan riset dan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga diharapkan dapat menjadi catatan bagi penegak hukum agar tidak hanya berhenti dalam pengungkapan kasus korupsi saja, namun dapat ikut serta dalam pemulihan korban akibat kasus korupsi yang diungkap.



Kekompleksitasan bahasa serta bahasan yang diungkap sehingga para pembaca terutama para penegak hukum atau akademisi, dapat memahami serta menerima fakta-fakta yang diungkap dalam buku ini dengan baik. Namun, hal ini juga sekaligus menjadi kekurangan dalam buku ini, dikarenakan segmentasi pembaca menjadi terbatas. Pembaca umum akan kesulitan membaca buku ini karena kerangka buku yang dibuat seperti laporan penelitian serta bahasa yang digunakan bahasa ilmiah. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku ini sangat layak dibaca oleh akademisi dan penegak hukum yang peduli tentang pemulihan korban akibat tindak pidana korupsi.

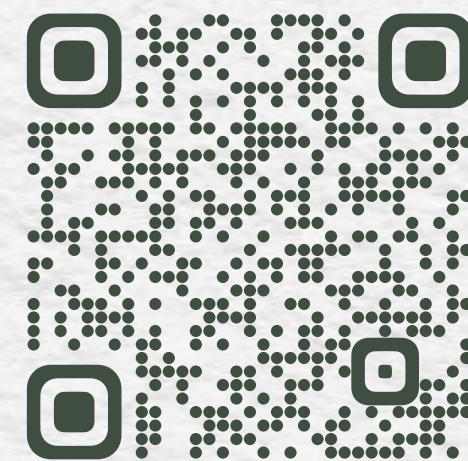


Penulis : KPK, Anugerah Rizky Akbari,
Sri Bayuningsih Praptadina,
Lovina
Penerbit : KPK
Tahun Terbit : 2021
Tebal Buku : 158

Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective

Ahmad Mukhlis Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono

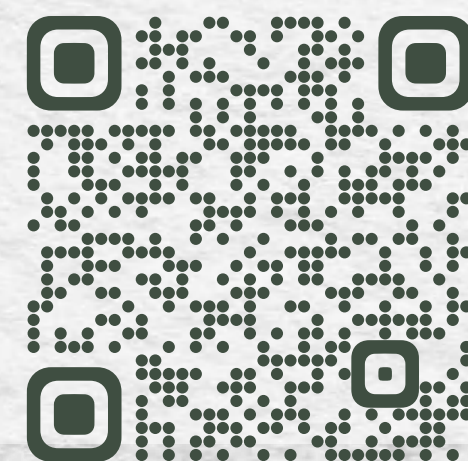
Controversy regarding the death penalty in Indonesia is never-ending, particularly with regard to its application for crimes of corruption. This study offers a reflective analysis based on a utilitarian paradigm, which sees beneficiaries as a justification for the enactment of the law. Utilitarianism is used as an analytical tool, because corruption is directly linked to state finances, meaning that legal sanctions must be enacted to ensure public benefit. The result of this study shows that the benefit generated by enacting the death penalty is unimpactful, whilst the costs are high, meaning that the imposition of the death penalty for corruptors is not proportionate according to a utilitarian perspective and a cost and benefit analysis.



Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes

Nandha Risky Putra, Rosa Linda

Corruption in Indonesia has threatened all aspects of social, national and state life. Corruption has also brought enormous material losses to state finances regarding economy, society and culture. Moreover, the corruption act prompted inevitable social changes due to crime. The main concern in this article is to perceive and analyze the social development related to the corruption act. The article furthermore highlights the measure taken by Indonesia's government to overcome such an impact on society caused by the presence of corruption acts. The method used in this article is normative legal research, which is prescriptive analytical, through a conceptual, a statute and a case approach in assessing community participation in efforts to prevent corruption. The result of this study shows that corruption fosters the decline in social welfare, compelling the broad society to be afflicted by these irresponsible behaviors conducted by the corruptors. In this regard, the government is encouraged to encounter efforts to involve public participation in optimizing the prevention of corruption acts. This effort includes the direction to increase public awareness, step actions, and procedural motions that the community can perform in overcoming corruption acts.



Koleksi Bulan Ini!



01

Di Bawah Cengkeraman KPK: Pergulatan para Korban Penyalahgunaan Kewenangan KPK

Penegakan hukum bukanlah peristiwa otonom yang netral dan sekali terjadi. Ia seperti membangun sistem demokrasi, adalah proses pembelajaran sosial yang panjang dan majemuk.

Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal objek pembedaan, yaitu pembedaan, pemulihan aset dan pencegahan. Dimana, semuanya telah ditentukan dalam KUHP, Undang undang Tindak Pidana Korupsi.

02



03

Masalah Korban Kejahatan

Dalam buku Masalah Korban Kejahatan ini terdapat berbagai macam hal yang berkaitan dengan keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan berbagai perwujudan penimbunan korban kejahatan yang non struktural dan struktural. Hal-hal ini menjadi perhatian sebagai dasar untuk memahami masalah terjadinya kejahatan.

Koleksi Bulan Ini!



04

Memahami *Whistleblower*

Buku ini menguraikan ranah kerja LPSK dalam konteks perlindungan terhadap *whistleblower* dalam konteks hukum pidana dan dalam konteks sistem pelaporan untuk mengungkap pelanggaran - pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan perusahaan.

Rezim Pemulihan Aset : Antara Dibenci dan Dibutuhkan

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal objek pemidanaan, yaitu pemidanaan, pemulihan aset dan pencegahan. Dimana, semuanya telah ditentukan dalam KUHP, Undang undang Tindak Pidana Korupsi.

05



Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based/ NCB Asset Forfeiture*)

06

Panduan ini disusun menjadi tiga bagian utama: Bagian A pertama memberikan gambaran umum tentang masalah aset yang dicuri dan masalah pengembalian aset setelah dipindahkan ke luar negeri.

